

PERANAN HASIL PENELITIAN BALITBANGDA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

HAVIDZ AIMA, LINDAWATI dan EVI FRIMAWATY

Balitbangda Provinsi Jambi

PENDAHULUAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) telah terbentuk di Provinsi Jambi. Secara formal ditetapkan dalam Perda No. 5 tahun 2000. Tugas dan fungsi utama Balitbangda adalah membantu Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembinaan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan teknologi penelitian sesuai dengan formulasi dan kebijakan daerah Jambi. Dengan berdirinya Balitbangda tersebut diharapkan unit kerja / lembaga penelitian di daerah akan lebih terarah dan bermanfaat guna kepentingan masyarakat Jambi pada umumnya dan memberikan masukan kepada Pemda Jambi berupa acuan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembangunan.

Sebagai lembaga penelitian yang bersifat lintas sektoral, maka Balitbangda memiliki tugas yang sangat beragam. Untuk itu diperlukan program penelitian dan pengembangan secara padu. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2005 telah disusun program yang menjadi arah kegiatan Balitbangda, program tersebut meliputi: (1) Peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam, teknologi dan kemasyarakatan, (2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan antar dinas/instansi pemerintah dan swasta, (3) Evaluasi kinerja program-program strategis di daerah dan penyelesaian isu-isu penting dan mendesak, dan (4) Sosialisasi, diseminasi dan efektivitas pemanfaatan hasil-hasil litbang.

Sejak Balitbangda didirikan telah dibentuk beberapa kelembagaan antara lain: (1) Komisi Teknologi yang beranggotakan semua dinas/instansi terkait, bertugas untuk memberikan arahan penelitian di daerah dan menetapkan rekomendasi teknologi hasil

penelitian; (2) Unit Kerja Sentra Promtek Rang Kayo Itam Jambi, untuk ajang promosi teknologi hasil Litbang Jambi; (3) Komisi Daerah Plasma Nuftah yang berkoordinasi dengan Komisi Nasional Plasma Nuftah untuk mengkonservasi Plasma Nuftah khas Jambi; (4) Sentra HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) kerjasama dengan Ditjen HaKI, sebagai lembaga pendaftaran hak paten karya cipta anak negeri Jambi.

Selain itu telah dilakukan kerjasama dengan penyandang dana seperti: (1) Kementerian Riset dan Teknologi untuk kegiatan promosi teknologi; (2) Departemen Pendidikan Nasional dalam melaksanakan Review Sektor Pendidikan Kota Jambi, dan (3) Departemen Kimpraswil dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Jambi.

Memasuki tahun ke tiga (2003) Balitbangda telah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dan beberapa diantaranya menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk pengambilan kebijakan. Hasil-hasil penelitian tersebut seperti berikut.

HASIL PENELITIAN

Bidang Pemerintahan

1. Studi Kelembagaan Pemanfaatan dan Pengembangan Aparatur Daerah di Provinsi Jambi

Hasil

Belum efisiennya kelembagaan/stuktur organisasi.

Rekomendasi

(1) Perlu melakukan efisiensi di segala bidang terutama dalam penataan kelembagaan /restrukturisasi organisasi Pemerintah Daerah.

Redistribusi (*distribution of area*) Aparatur Daerah; (2). Penciptaan visi dan misi masing-masing dinas/instansi yang realistis dan dapat dicapai organisasi, serta diketahui oleh semua staf; (3). Pengembangan SDM aparatur daerah yang profesional; (4). Penciptaan networking antar daerah otonom; dengan melibatkan kemitraan antara 'pemerintah daerah, masyarakat (LSM) dan dunia usaha'. (5). Pelayanan publik yang transparan, fleksibel dan akuntabel serta menghindari biaya tinggi.

Tindak lanjut

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jambi belum mengangkat CPNS karena hasil dari penelitian ini menunjukkan di lingkungan Pemprov Jambi terdapat *kelebihan* pegawai.

2. Studi Inventarisasi dan Pengkajian Tugas-Tugas Pemerintah Provinsi pada Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Hasil

Tugas-tugas instansi di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada lintas kab/kota dalam Provinsi Jambi. Selain itu terdapat kewenangan atau tugas-tugas yang belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Rekomendasi

(1). Agar seluruh dinas/instansi provinsi merinci kewenangan secara konkrit dari pembidangan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada masing-masing dinas/instansi; (2). Agar tidak terjadinya pemahaman dan persepsi yang berbeda oleh masing-masing dinas/instansi pelaksana terhadap PP. 25/2000 maka penjabaran dari rincian kewenangan yang dibuat oleh masing-masing dinas/instansi Provinsi Jambi perlu ditindaklanjuti melalui **Perda Provinsi Jambi**; (3). Untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat, maka sejumlah sub-bag kewenangan yang belum mampu dilaksanakan oleh kab/kota agar ditindaklanjuti dalam bentuk **kerjasama antar kabupaten/kota, kerjasama dengan provinsi atau diserahkan ke propinsi** untuk

ditetapkan dengan **Keputusan Kepala Daerah**; (4). Beberapa kewenangan yang dapat ditindaklanjuti dari masing-masing kabupaten/kota sbb :

- **Kota Jambi** : bidang Pelayanan Umum, perikanan, tenaga kerja dan sosial.
- **Kab. Batang Hari** : bidang Pelayanan Umum, kesehatan, pertanian Tanaman Pangan, perikanan, peternakan, perhubungan, perindagkop, sosial pertambangan dan energi.
- **Kab Ma Jambi** : bidang Pelayanan Umum, kesehatan, pertanian, peternakan, perhubungan, perindag, LH, pertanahan, tenaga kerja, sosial, kehutanan, dan pertambangan dan energi.
- **Kab. Tanjabbar** : bidang Pelayanan Umum, kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, pertanian Tanaman Pangan, perkebunan, perikanan, perhubungan, perindag, Lingkungan Hidup dan kelautan.
- **Kab. Tanjabtim** : bidang Pelayanan Umum, kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, perikanan, perhubungan, perindustrian dan dagangan. Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Tindak lanjut

Sudah ditindaklanjuti oleh Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov Jambi, dimana setiap dinas/instansi diharuskan memiliki *rincian/penjabaran* bidang kewenangan yang ada pada dinas/instansi masing-masing.

3. Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Propinsi Jambi

Hasil

Dari hasil analisis menunjukkan terdapat fungsi tumpang tindih antara unit kerja

Rekomendasi

Penyempurnaan rancangan tugas pokok, fungsi dan sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi

Tindak lanjut

Sebagai dasar kebijakan penyusunan nomenklatur organisasi pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mengacu pada implementasi PP No.8 Tahun 2003, oleh Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi

4. Analisis Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003

Hasil

Ditemukan sejumlah Dinas/Instansi yang tidak sesuai dengan PP No.8 Tahun 2003.

Rekomendasi

Dasar penetapan sejumlah rancangan nomenklatur kelembagaan di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi disesuaikan dengan isi PP No.8 Tahun 2003.

Tindak lanjut

Sebagai dasar kebijakan Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi dalam penyusunan nomenklatur organisasi pemerintah daerah di Provinsi Jambi yang mengacu pada implementasi PP No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bidang Kemasyarakatan

1. Studi Model Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam Konteks Kepastian Hukum Guna Mendukung Investasi di Provinsi Jambi

Hasil

Persengketaan terjadi sebagai akibat : (1) Perbedaan tafsir atas tanah ulayat; (2) Proses dan besarnya ganti rugi dianggap tidak adil; (3) Manajemen pola kemitraan tidak transparan antara perusahaan, koperasi dan peserta; (4) Kecemburuan sosial akibat pola pengembangan usaha perkebunan yang tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra; (5) Penelantaran lahan yang dilakukan perusahaan yang telah memperoleh izin pengusahaan.

Rekomendasi

Penyelesaian konflik pertanahan sekitar usaha perkebunan yang dilatarbelakangi oleh permasalahan tanah ulayat, dapat berbentuk: (1) "ganti rugi", (2) membayar *royalti* kepada masyarakat hukum adat, atau (3) mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha perkebunan melalui pola mitra. Harus ada kebijakan daerah (melalui perda) yang mengatur perubahan pola pengembangan usaha perkebunan yang mengarah pada pola

pengembangan usaha bersama yang saling menguntungkan

Tindak lanjut

Perlu adanya lembaga penyelesaian persengketaan alternatif yang bersifat independen (lembaga arbitrase) di setiap kabupaten/kota. Pendirian badan arbitrase daerah yang diprakarsai oleh PSKODA

2. Studi Perilaku Petani Karet

Hasil

Petani karet umumnya : menggunakan bibit lokal, pemasaran karet hanya didalam desa, dan karet yang dihasilkan bermutu rendah.

Rekomendasi

(1) Penyuluhan agribisnis karet, dan peremajaan tanaman karet dalam bentuk proyek terpadu dengan menggunakan bibit unggul, (2) Didirikan pasar lelang karet dengan sarana yang baik untuk memperkuat manajemen KUD dalam pembelian karet rakyat

Tindak lanjut

Beberapa kabupaten telah mendirikan pasar lelang karet

3. Studi kelayakan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Hasil

JPKM di Kabupaten Bungo dan Tebo tidak layak dikembangkan pada kelompok masyarakat tertentu hal ini berlawanan dengan kehendak masyarakat umumnya JPKM di laksanakan di Kabupaten Bungo dan Tebo

Rekomendasi

Untuk mendirikan JPKM perlu ditinjau dari 3 aspek: (1) Aspek Lingkungan : komitmen dari pemda pusat dan daerah, adanya RUU JPKM dan perda; (2) Aspek kepesertaan : JPKM diorganisir dari unit masyarakat terkecil, yang menjadi tanggungan adalah keluarga inti; (3) Aspek pelayanan : prioritas rawat jalan dan rawat inap.

Tindak lanjut

Belum terbentuk, tetapi terdapat respon dari pihak terkait untuk menyatukan lembaga JPKM di Propinsi Jambi

4. Penelitian Pembangunan Istana Sultan Taha

Hasil

Replika Istana Sultan Taha dibangun sebagai berikut : Konstruksi bangunan dari kayu, atap bangunan dari terakota, bubungan dari semen putih, tata ruang dan interior harus menyamai bangunan Sultan Taha yang ada di Tanah Garo.

Rekomendasi

(1) Pendirian Istana Sultan Taha harus menggambarkan sejarah perjuangan Sultan Taha Syaifudin ketika dalam suasana perang dengan Belanda dengan tidak mengubah ciri khas sesuai dengan sisa-sisa peninggalan yang masih ada; (2) Pendirian replika Istana Sultan Taha sebaiknya tidak dibangun diatas situs aslinya dengan membuat master plan kelayakan terlebih dahulu

Tindak lanjut

Sedang dibangun Replika Istana Sultan Thaha di Kabupaten Tebo

Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Kajian Basis Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pembangunan Fundamental Ekonomi Prov. Jambi

Hasil

Sektor/Sub Sektor Basis Provinsi Jambi : (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (Sub. Sektor Tanaman, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan); (2) Perdagangan, Hotel & Restoran; (3) Pengangkutan & Komunikasi, (4) Jasa-jasa.

Sektor Sub sektor Basis Kota Jambi

Kecuali sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (Sub. Sektor Tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan & Kehutanan), Pertambangan dan Penggalian maka sektor lainnya merupakan sektor basis.

Rekomendasi

Untuk mengefisienkan basis : (1) Diperlukan keterlibatan dunia usaha untuk menginvestasikan dana guna menggerakkan pembangunan; (2) Perlu adanya peningkatan nilai tambah produk-produk primer secara keseluruhan; (3) Perluasan diversifikasi produk; (4) Menata kembali manajemen administrasi pintu masuk dan keluar produk

Tindak lanjut

Sebagai dasar kebijakan Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas sektor basis.

2. Studi Kelayakan Industri Pakan Ternak di Provinsi Jambi

Hasil

Industri Pakan Ternak layak didirikan di Kabupaten Muaro Jambi, dengan spesifikasi untuk ternak unggas dan ikan

Rekomendasi

Untuk pendirian pabrik pakan ternak (Unggas dan Ikan) harus melibatkan stake holder dalam pendanaan.

Tindak lanjut

Sebagai dasar bagi pendirian pabrik pakan ternak bagi Pemerintah Propinsi Jambi

3. Evaluasi Kebutuhan Transmigrasi di Provinsi Jambi

Hasil

Secara umum Provinsi Jambi tidak mampu menampung transmigrasi dari luar kecuali untuk Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabbar

Rekomendasi

Pengembangan transmigrasi di Provinsi Jambi hendaknya berbentuk kawasan yang merupakan penggabungan antara desa-desa emigrasi dan desa-desa asli sehingga dapat menekan kesenjangan pembangunan antar desa.

Tindak lanjut

(1) Dijadikan sebagai dasar revisi arah kebijakan transmigrasi di Indonesia oleh

Deptran RI, dan (2) Dijadikan dasar kebijakan bagi pemda untuk penerimaan transmigrasi di Prov. Jambi

Bidang SDA dan Teknologi

1. Studi Pemanfaatan Jerami Padi Amoniasi sebagai Pakan Ternak Sapi Potong

Hasil

Pemakaian jerami padi amoniasi menghasilkan pertambahan bobot badan ternak melebihi dari pemakaian rumput alam pada sapi potong.

Rekomendasi

Pemanfaatan jerami amoniasi sebaiknya diaplikasikan pada daerah-daerah berbasis persawahan sehingga berkembang sistem pertanian terpadu dengan konsep zero waste.

Tindak lanjut

(1) Sebagai dasar bagi pemda kabupaten yang mempunyai basis persawahan dalam mengembangkan peternakan sistem terpadu.

(2) Memungkinkan pemda kabupaten yang mempunyai basis persawahan untuk mendirikan pabrik pakan ternak (sapi) dengan menggunakan bahan baku jerami padi.

PENUTUP

Selama kurang lebih tiga tahun sejak berdiri tahun 2000, hasil penelitian Balitbangda masih dalam dimensi yang terbatas, namun demikian beberapa hasil kegiatannya telah menjadi bahan kebijakan bagi Pemprov Jambi. Kedepan Balitbangda sebagai institusi lintas sektoral dan posisinya yang strategis, akan lebih meningkatkan kualitasnya sehingga program penelitian yang disusun semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Jambi.